

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai penutup perlu peneliti sampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi program PNPM mandiri Pedesaan di desa Puluhan masih dapat di katakan cukup berhasil karena adanya partisipasi masyarakat dan petugas pelaksana. Akan tetapi, dalam implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di desa Puluhan ini masih sebatas peningkatan dan perbaikan infrastruktur.
2. Hambatan dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di desa Puluhan, Trucuk adalah:
  - a) Masih kurangnya informasi kepada masyarakat desa Puluhan terkait bantuan usaha dalam program PNPM mandiri Pedesaan
  - b) Pelaksana program PNPM mandiri Pedesaan didesa Puluhan masih kurang professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendukung pemerintah pusat.
  - c) Komitmen dan keahlian pelaksana program PNPM mandiri Pedesaan di desa Puluhan ini masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang intensif terkait program PNPM mandiri.

- d) Tahapan-tahapan yang dirasa terlalu rumit dan memakan waktu yang cenderung lama membuat penanganan masalah kemiskinan ini tidak sampai pada tujuan dilaksanakannya program.
- e) Pelaksana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di desa Puluhan tidak dapat memaksimalkan kreatifitas dan inisiatif untuk mengembangkan kegiatan PNPM Mandiri di desa Puluhan karena keputusan pengesahan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang masih tergantung pada pemerintah pusat

## **B. Saran**

1. Program pengentasan kemiskinan sebaiknya lebih berorientasi pada pemerataan pendapatan agar kesenjangan sosial tidak semakin timpang dan permasalahan kemiskinan tidak semakin rumit.
2. Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, harus ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dengan cara mengakomodir program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran
3. Untuk mendapatkan profesionalitas pelaksana program, perlu di terapkan sistem tenaga fungsional sebagaimana pelaksana program pengentasan kemiskinan itu di akui sebagai tenaga professional dan mendapat tunjangan fungsional/tunjangan profesi.
4. Tahapan dalam pelaksanaan perlu dirampingkan agar tidak terlalu berbelit sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dengan lebih baik.

5. Pemerintah pusat sebaiknya memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah (kabupaten Klaten) sesuai dengan prinsip otonomi untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan program.